

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2019. APBN 2019.  
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>. Diakses tanggal 10 April 2020
- Direktorat Jenderal Pajak . 2018. Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018.  
<https://stats.pajak.go.id/artikel/ayu-ajukan-surat-keterangan-bukti-anda-adalah-umkm>. Diakses tanggal 10 April 2020
- <https://aviantara.wordpress.com/2011/04/18/mengenal-sanksi-pajak/>  
<https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak>
- Republik Indonesia 2007. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia 2008. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*
- Republik Indonesia 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- Republik Indonesia Nomor 99 PMK.03/2018 *tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia buku I edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat